



TRANSPARANSI

PARTISIPASI

INOVASI

AKUNTABILITAS

# PENAJAMAN RENAKSI OGI 2018-2020



## Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya (Nawacita 2 - RPJMN)

**Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja**

**Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan**

**Penerapan Open Government**

1. Pembentukan PPID
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik
3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran
4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik
5. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik
6. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

# PENYELENGGARAAN OGI MENDUKUNG RKP



# CAPAIAN RENAKSI OGI



Sekumpulan program kerja yang disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif.

Beberapa inisiatif yang ditelurkan melalui rencana aksi OGI dan berkelanjutan s/d sekarang antara lain:



Kanal aduan publik nasional  
Bagian dari amanat UU 25/2009



Akselerasi penyelenggaraan Pejabat  
Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi  
Bagian dari amanat UU 14/2008



Penyelenggaraan Portal Nasional  
Data terbuka (*Open Data*)

**SATU PETA**

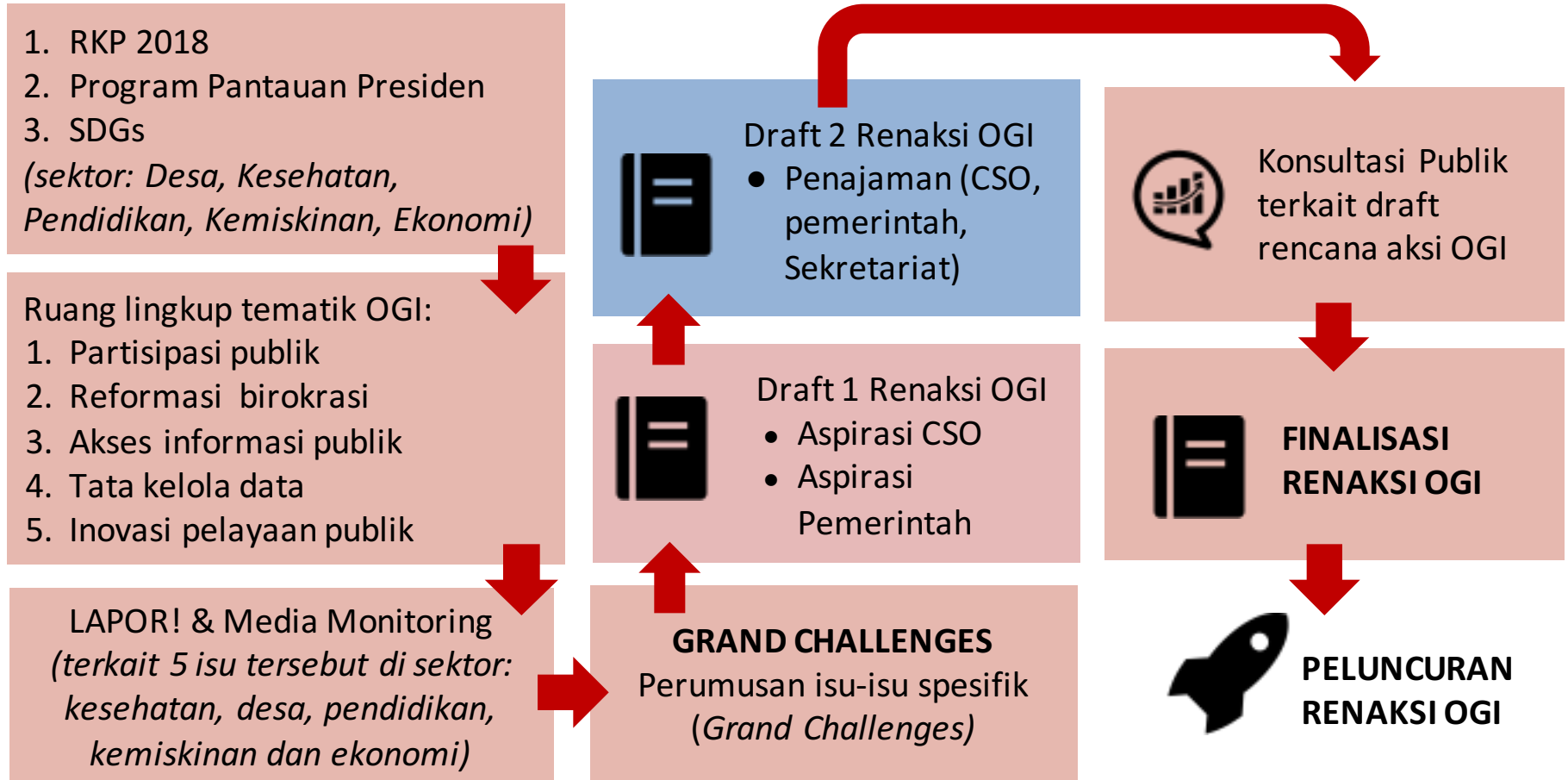
Penerbitan Perpres 9/2016 yang  
mengakselerasi perbaikan informasi  
Geo-spasial



# KELEMBAGAAN PENGELOLA OGI



# PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI OGI

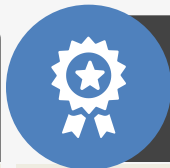


# RANCANGAN RENAKSI OGI 2018-2020



## PARTISIPASI PUBLIK

- Forum Akuntabilitas Data Bidang Kesehatan
- Partisipasi Pengawasan Anggaran Pendidikan
- Perencanaan dan Penganggaran Desa Terbuka
- Forum Konsultasi Publik di KLD



## REFORMASI BIROKRASI

- Kualitas Penyelesaian Aduan LAPOR!-SP4N
- Sistem Pengaduan & Pengawasan Bidang LHK
- Integrasi Data dan Keterbukaan dalam Pemilu dan Pilkada
- Partisipasi Masyarakat dalam Perda melalui Portal E-Legislasi.



## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa
- Tata kelola keterbukaan pemerintah Indonesia



## AKSES INFORMASI PUBLIK

- *Beneficial Ownership* terintegrasi dan dapat diakses oleh publik
- Keterbukaan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Penanggulangan Kemiskinan
- Publikasi Informasi Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah

## KEPEMILIKAN MANFAAT



**1. Pembukaan Data Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.**

Informasi penerima manfaat dari sebuah perusahaan yang tertutup menghambat peningkatan pendapatan negara dan menciptakan celah korupsi. Untuk menutup praktik korupsi itu, pemerintah menerbitkan Perpres No.13/2018. Tahapan selanjutnya, perlu diterbitkan regulasi teknis yang memuat pelaksanaan BO. Hal yang terpenting, data tersebut harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

### **Target Akhir:**

Tersedianya publikasi data kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) yang dapat diakses oleh publik

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kementerian Hukum dan HAM

### **POC CSO:**

PWYP Indonesia

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Pembukaan Data Kepemilikan Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.	Tersedianya publikasi data kepemilikan manfaat ( <i>beneficial ownership</i> ) yang terpusat dan dapat diakses oleh publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya sosialisasi &amp; penguatan kapasitas Transparansi kepemilikan manfaat (Perpres No.13/2018) kepada kementerian/lembaga, korporasi dan CSO</li> <li>2. Tersedianya peraturan turunan Perpres 13/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait</li> <li>3. Tersedianya peraturan yang memuat ketentuan tentang pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi kepemilikan manfaat untuk mendukung pengembangan sistem pelayanan administrasi korporasi</li> <li>4. Tersedianya daftar xx perusahaan yang termuat dalam sistem pelayanan administrasi korporasi dan sudah tervalidasi dan dipublikasikan</li> </ol>	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas Sekretariat EITI PPATK Kementerian Keuangan Kemenko Perekonomian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kantor Staf Presiden



## **2. Penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Data Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan**

Informasi kepesertaan program perlindungan sosial bidang kesehatan belum mencerminkan kondisi lapangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dengan membentuk Forum Akuntabilitas Data. Forum ini bersifat multipihak. Forum bertujuan untuk memberikan data yang mutakhir (verifikasi & validasi) sehingga data perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan akuntabel

### **Target Akhir:**

Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang melibatkan publik (partipatif)

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kementerian Sosial

### **POC CSO:**

Medialink



Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Penyelenggaraan Forum Akuntabilitas Data Program Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan	Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang melibatkan publik (partipatif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data perlindungan sosial bidang kesehatan</li> <li>2. Tersedianya daftar kementerian/ lembaga dan pemda yang melaksanakan forum akuntabilitas data</li> <li>3. Tersedianya update data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang diusulkan oleh forum akuntabilitas data</li> </ol>	Kementerian Sosial	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Kesehatan



### 3. Meningkatkan kualitas akses keterbukaan anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan

Data anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dapat diakses melalui portal anggaran APBN. Namun, portal ini masih belum berfungsi secara optimal. Dibutuhkan mekanisme akses data yang lebih mudah. Selain itu, untuk memantau kualitas dari penyerapan anggaran ketiga sektor tersebut, perlu keterhubungan antara kementerian terkait untuk dapat mengakses data yang ada.

#### Target Akhir:

Tersedianya kemudahan akses data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan

#### PIC Kementerian dan Lembaga:

Kementerian Sosial

#### POC CSO:

SEKNAS FITRA



Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Meningkatkan kualitas akses keterbukaan anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya kemudahan akses data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. prosentase pengguna mengakses data portal data APBN</li> <li>2. Tersedianya struktur data anggaran nasional dan daerah yang memuat informasi yang sama sehingga dapat dianalisis</li> </ol>	Kementerian Keuangan	Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial
	Tersedianya himbauan dan panduan bagi instansi publik untuk melakukan publikasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SE Kementerian Dalam Negeri untuk meminta setiap daerah mempublikasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan untuk di publikasikan dalam website daerah</li> <li>2. Terhubungnya portal anggaran daerah dengan data anggaran pada Kementerian Keuangan</li> <li>3. Tersedianya struktur data anggaran nasional dan daerah yang memuat informasi yang sama sehingga dapat dianalisis</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri	

#### **4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan**

Sebesar 20 persen anggaran pemerintah dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun, fungsi kontrol anggaran sekolah saat ini belum efektif karena pola monitoring dan pengawasan hanya bertumpu pada pengawasan internal, sedangkan pengawasan masyarakat masih sangat minim. Untuk mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan dibutuhkan indikator monitoring yang lebih dalam dan juga mekanisme akuntabilitas yang dapat di gunakan secara aktif oleh warga.

##### **Target Akhir:**

Terlaksannya pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan yang partisipatif

##### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

##### **POC CSO:**

Transparency International Indonesia

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendidikan	Terlaksannya pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidikan yang partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya indikator monitoring anggaran pendidikan yang dapat digunakan untuk mengukur dampak dari anggaran yang telah dialokasikan</li> <li>2. Tersedianya mekanisme pemantauan bersama untuk mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan</li> </ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ombudsman RI



## **5. Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Desa yang Terbuka dan Partisipatif**

Pelibatan masyarakat desa dalam memantau aktivitas pembangunan perlu untuk didorong. Salah satu upaya yakni tidak hanya dengan melibatkan masyarakat desa secara luas. Untuk mendorong partisipasi yang luas, telah diterbitkan Surat Kepala Staf Kepresidenan sebagai acuan untuk perbaikan tata cara musdes yang terbuka dan lebih partisipatif. Dari sisi transparansi anggaran juga didorong agar pemerintah desa mempublikasikan rencana anggaran hingga level unit cost.

### **Target Akhir:**

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kemendagri dan Kementerian Desa & PDT

### **POC CSO:**

PATTIRO

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Desa yang Terbuka dan Partisipatif	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya revisi Permendagri No.113/ 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>2. Tersedianya Permendagri No.114/ 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa</li> <li>3. Tersedianya surat edaran terkait pempublikasian anggaran desa hingga unit cost sebagai bentuk transparansi terhadap proyek pembangunan di desa</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri	Kantor Staf Presiden Bappenas
		Tersedianya revisi Permendes 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	



## 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masih tertutup tanpa melibatkan masyarakat. Dalam proses pelibatan masyarakat, dapat dijumpai pembahasan peraturan di tingkat legislatif dapat dilakukan melalui E-legislasi. Platform ini dapat diakses melalui website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kegiatan ini dilakukan dengan pengembangan portal E-Legislasi dan penguatan kapasitas pengelola platform tersebut.

### Target Akhir:

Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat

### PIC Kementerian dan Lembaga:

Kementerian Dalam Negeri

### POC CSO:

IPC

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi.	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislasi</li> <li>2. Tersedianya platform e-legislasi dalam website DPRD</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri	Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika



## **7. Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada**

Data kepemiluan, data proses pemungutan suara dan data hasil perhitungan suara merupakan sumber informasi yang penting. Penggunaan data tersebut kerap kali menjadi celah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum. Upaya keterbukaan tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data kepemiluan dengan portal satu data dan membangun platform elektronik untuk menjamin keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu.

### **Target Akhir:**

Tersedianya data tentang penyelenggaraan pemilu dalam portal [satudata.go.id](https://satudata.go.id) dan tersedianya platform E-Recap beta

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

### **POC CSO:**

Perludem



Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya transparansi data kepiluan</li> <li>2. Tersedianya platform E-Recap beta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasinya data penyelenggaraan pemilu pada portal satu data</li> <li>2. Tersedianya perencanaan (roadmap) pengembangan e-rekap yang terdiri dari studi kelayakan dan berbagai kebutuhan teknis lainnya</li> <li>3. Tersedianya platform e-recap beta yang dapat diujicobakan di daerah</li> </ol>	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Kantor Staf Presiden Bawaslu RI Kementerian Dalam Negeri BPPT DPR RI: Komisi II



## 8. Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah

Akses atas kesehatan seringkali terhambat oleh minimnya informasi terkait ketersediaan kamar, dokter, obat, dan jasa kesehatan. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap status ketersediaan layanan, sehingga pasien cenderung mencari penyedia lain dengan ketidakpastian serupa. Pemerintah seharusnya berkomitmen untuk meningkatkan penyediaan informasi pelayanan kesehatan yang terbuka dan valid.

## Target Akhir:

Tersedianya informasi tentang ketersediaan layanan kesehatan di "xx" rumah sakit dan puskesmas

### PIC Kementerian dan Lembaga:

Kementerian Kesehatan

## POC CSO:

ICW

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah	Tersedianya informasi yang valid dan real time terkait ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan fasilitas kesehatan lainnya	Tersedinya informasi tentang ketersediaan layanan kesehatan (kamar, dokter, obat, dan lain sebagainya) di "xx" rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri



## 9. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/ Lembaga

Masyarakat kerap kali merasa kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Kementerian KemenPAN-RB menerbitkan Permen PAN-RB No.16 tahun 2017 dan Surat Edaran No.56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahapan sosialisasi telah dilakukan oleh KemenPAN-RB di Kementerian/ Lembaga dan Pemda. Tahapan selanjutnya, adalah implementasi FKP khususnya pada sektor pendidikan, dan kesehatan.

### **Target Akhir:**

Terlaksananya forum konsultasi publik di "xx" kementerian

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

KemenPAN RB

### **POC CSO:**

YAPPIKA Action Aid

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/ Lembaga	Terlaksananya forum konsultasi publik di "xx" kementerian dan lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya "xx" daftar k/L yang telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik</li> <li>2. "xx" persen rencana aksi forum konsultasi publik yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Desa dan PDT Kementerian Dalam Negeri



### 10. Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui LAPOR!-SP4N

Sejumlah tantangan masih dihadapi oleh LAPOR-SP4N, antara lain: (i) jumlah laporan yang ditindaklanjuti masih rendah; (ii) proses integrasi di tingkat pemerintah daerah masih lambat; (iii) Respons pengelola LAPOR!-SP4N yang belum memuaskan pelapor dan cenderung tidak menyelesaikan masalah; (iv) Data pengaduan melalui LAPOR!-SP4N belum digunakan sebagai salah satu basis pembuatan kebijakan.

#### Target Akhir:

Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N

#### PIC Kementerian dan Lembaga:

KemenPAN RB

#### POC CSO:

YAPPIKA Action Aid

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N	Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam LAPOR!-SP4N	Sebanyak "xx" persen pengaduan yang masuk ke LAPOR! telah ditindaklanjuti	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KSP Ombudsman RI



## **11. Pengembangan Sistem Layanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi**

Portal pengaduan lingkungan hidup yang tersedia masih belum terintegrasi secara menyeluruh (pengduan tenurial, LAPOR dan Gakum). Untuk itu dibutuhkan sistem informasi pengaduan dan/atau pengawasan membuka lebih banyak informasi mengenai status pengelolaan pengaduan dan/atau pengawasan yang dilakukan oleh KLHK.

### **Target Akhir:**

Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam sistem pengaduan dan pengawasan KLHK yang terintegrasi

### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

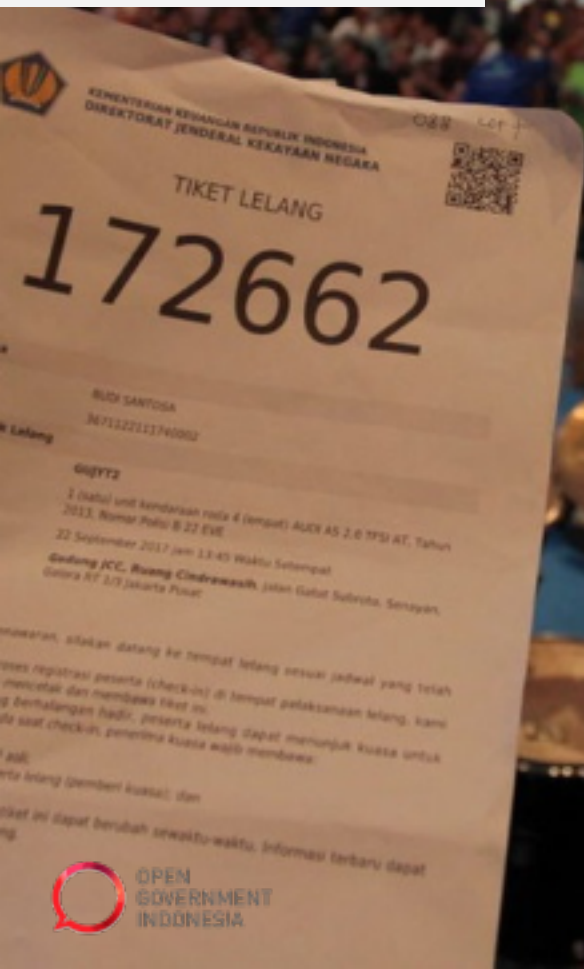
### **POC CSO:**

ICEL



Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Pengembangan Sistem Layanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup yang terintegrasi	Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam sistem pengaduan dan pengawasan KLHK yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Permen LH No.22/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.</li> <li>2. Menerbitkan rancangan Permen tentang pengawasan</li> <li>3. Tersedianya integrasi sistem pengaduan dan pengawasan di KLHK dan 50% UPTD KLHK</li> </ol>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian PAN dan RB Kantor Staf Presiden Ombudsman RI

## KETERBUKAAN KONTRAK



## 12. Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Salah satu cara untuk mencegah dan mengatasi persoalan pengadaan yang buruk adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Oleh karena itu, inisiatif open contracting diharapkan dapat membantu keterbukaan pengadaan publik dengan instrumen dan konten publikasi yang terstandarisasi. Untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dibutuhkan perubahan kebijakan (LKPP maupun Peraturan Komisi Informasi) dan juga mengembangkan inovasi teknologi berbasis *Open Contracting Data Standard* (OCDS).

### Target Akhir:

Terpublikasikannya seluruh dokumen pengadaan dalam bentuk data terbuka

### PIC Kementerian dan Lembaga:

LKPP dan Komisi Informasi Publik

### POC CSO:

ICW

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Terpublikasikan nya seluruh dokumen pengadaan dalam bentuk data terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan Perka LKPP tentang publikasi data kontrak, kinerja rekanan dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan.</li> <li>2. Tersedianya teknologi yang berfungsi untuk memfasilitasi konversi data SPSE ke dalam <i>Open Contracting Data Standard (OCDS)</i>.</li> <li>3. Tersedianya sistem daftar hitam (<i>black listing</i>) dan mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa</li> </ol>	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
		Merevisi Perki No.1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Komisi Informasi Publik	

### **13. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia**

Keterbukaan pemerintah Indonesia (Open Government Indonesia/ OGI) sudah berlangsung sejak tahun 2012. Semenjak berjalannya kegiatan OGI, organisasi masyarakat sipil menilai tata kelola OGI perlu dikuatkan. Aspek penguatan tersebut terdiri dari desain kelembagaan, pendanaan, perencanaan strategis yang terangkum dalam peta jalan (roadmap) serta penguatan komitmen renaksi dalam kerangka regulasi ataupun kebijakan stratehis lainnya.

#### **Target Akhir:**

Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia

#### **PIC Kementerian dan Lembaga:**

Kementerian PPN/ Bappenas

#### **POC CSO:**

INFID

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya konsultasi publik terkait draft Peraturan Presiden tentang Open Government Indonesia</li> <li>2. Tersosialisasikannya Peta Jalan keterbukaan pemerintah indonesia</li> <li>3. Indeks keterbukaan pemerintahan Indonesia terpublikasi kepada masyarakat luas</li> <li>4. Teralokasinya dukungan pendanaan untuk pemerintah daerah dan CSO untuk memperkuat open government</li> <li>5. Terpublikasinya SK terkait pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah indonesia 2018-2020</li> </ol>	Bappenas	Kantor Staf Presiden Kementerian Luar Negeri Kementerian Keuangan



# **INISIATIF DAERAH**



## Memperluas Praktik Keterbukaan Pemerintah pada Level Pemerintah Daerah

Inisiatif keterbukaan pemerintah pada level daerah belum diimplementasikan secara masif. Untuk mempercepat akselerasi implementasi keterbukaan pemerintah dibutuhkan panduan yang memuat tentang tahapan, prinsip dan juga kegiatan daerah percontohan yang dapat direplikasi.

### Target Akhir:

Terfasilitasinya kapasitas dan rencana aksi open government di 100 Kabupaten/ Kota

### Kementerian Terkait

Kementerian Dalam Negeri

### POC CSO

Medialink dan INFID



Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Penguatan pelaksanaan Keterbukaan Pemerintah di 100 Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya kapasitas dan rencana aksi open government di 100 Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100 kota/ kabupaten telah mengikuti penguatan kapasitas yang disediakan oleh OGI</li> <li>2. 50 kota/ kabupaten telah menyusun rencana aksi</li> </ol>	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian PAN dan RB Kantor Staf Presiden Bappenas





## Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Kesuksesan Bojonegoro sebagai daerah percontohan keterbukaan pemerintah membuat pelaksanaan tata kelola pemerintah yang transparan, partisipatif dan akuntabel terus berlanjut. Pada tahun ini, Bojonegoro tetap menjaga komitmen tersebut dengan membuat rencana aksi keterbukaan pemerintah tahun 2018-2020.



## **INISIATIF LAINNYA**



## 1. Peningkatan Transparansi *Commodity Trading* Batubara

Temuan diskrepansi mengindikasikan adanya transaksi ekspor yang tidak tercatat yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Untuk itu, keterbukaan data *commodity trading* dapat mempermudah pengawasan publik, termasuk dalam membandingkan data dengan negara importir untuk menilai adanya potensi penyelewengan, termasuk transaksi yang tidak tercatat.

### Sasaran Akhir:

Tersedianya data komoditas batubara yang terintergasi dengan Satu Data dan instansi terkait

### Kementerian Terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

### PIC CSO

PWYP Indonesia



## **2. Penguatan Akses Informasi Masyarakat Miskin Terhadap Bantuan Hukum**

Selain jaminan atas akses terhadap informasi, kesadaran dan kemampuan masyarakat juga harus ditunjang oleh sebuah sistem yang dapat membantu masyarakat menghadapi diskriminasi, korupsi, kekerasan ataupun keterbatasan sumber daya ketika mereka memperjuangkan hak-haknya. Agenda akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum memberikan ruang bagi rakyat untuk memahami dan memperoleh hak-haknya,

### **Sasaran Akhir:**

Tersedianya informasi layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat miskin

### **Kementerian Terkait**

Badan Pembinaan Hukum Nasional

### **PIC CSO**

YLBHI

# AGENDA SELANJUTNYA....



**Pertemuan  
Bilateral**

**Tanggal  
14-31 Agustus  
2018**



**Konsultasi  
Publik**

**Tanggal  
14-31 Agustus  
2018**



**Pengiriman  
Renaksi**

**Tanggal  
7 September  
2018**



**Launching**

**Tanggal  
30 September  
2018**



Masyarakat dapat ikut menyampaikan masukan terhadap Rancangan Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020. Silahkan masukan saran dan pendapat anda ke tautan berikut: **bit.ly/napOGI**



SEKRETARIAT  
NASIONAL



OPEN  
GOVERNMENT  
INDONESIA

Kompleks Istana Merdeka  
Gedung B, Kantor Staf Presiden  
Jalan Veteran III No. 2  
Jakarta, 10110

 Open Government Indonesia

 @OpenGovindo

 indonesiaopengov

[www.opengovindonesia.org](http://www.opengovindonesia.org)